DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah an-Nahl (16:90)

Awaniz, B.N. (2011). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Eks Karasidenan Pekalongan. Universitas Negeri Semarang.

Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah Edisi-2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Erlina, dkk. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri N. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Fajrina, & Suzan. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Kota Bogor. Manajemen, 2 (3), 3101-3108.

Firdausy, C.M. (2014). Efektifitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Firdausy, C.M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka.

Fuadi. (2016). Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi-4. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Indonesia, M.K.R. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ Pmk. 07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta : Kementrian Keuangan.

Indonesia, P.R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Keuangan, D.P. (2019). Proses Usulan Kegiatan dan Penganggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2020 Serta Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019. Jakarta : Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Keuangan, K. (2005). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press.

Kuncoro, M. (2014), Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta : Erlangga.

Lofland, dan Moleong. (2009). Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Mangeswuri, D.R. (2018). Bagian Ketiga Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, 57.

Nomor, Permedagri. (13) Tahun (2006). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nomor, Permedagri. (13) Tahun (2006). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.02/2016 tentang Klasifikasi Anggaran.

Nomor, U.U. (1). Tahun (2022). Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Nomor, U.U. (33). Tahun (2004). Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah, P. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat 23.

Pemerintah, P. No. (02) Tahun (2005). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

Pemerintah, P. No. (24) Tahun (2005). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Rosady, R. (2008). Manajemen Publik Relatoins dan Media Komunikasi. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Bussines : Building Approach. John Wiley & Sons.

Siregar, S. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Siregar, B. (2015). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : CV. Alfabeta.

Sunarso, S. (2023). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika.

Suprayitno, B. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan,* 2 (01), 106-112.

Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PEKA*, *6* (1), 11-22.

Syukri, M., & Didiharyono. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan PMA terhadap tingkat kemajuan daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Masagena,* Vol 13, 2 (1), 525-534.

Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, 2 (2), 30-37.

Ubar, H.R. (2010). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. Tesis.

Uhise, S. (2013). Dana alokasi umum (DAU) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi utara dengan belanja modal sebagai variabelm interverning. Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol. 1 (4), 1677-1686.

Undang-undang No. 58 Tahun (2005) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Yustisia, V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Visi Media.